

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PENYALAHGUNAAN WEWENANG PAJAK BUMI BANGUNAN DI
DINAS PENDAPATAN LABUHANBATU SELATAN
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
(Studi Putusan Nomor 3815 K/ Pid.Sus/ 2021/ PT-MDN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH

HAMRISYAH GAYO

2002100028

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LABUHANBATU

2024

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

JUDUL :ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PENYALAHGUNAAN WEWENANG PAJAK BUMI
BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN LABUHANBATU
SELATAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI
PUTUSAN NOMOR 3815 K/ PID. SUS/ 2021/ PT-MDN)

NAMA : HAMRISYAH GAYO

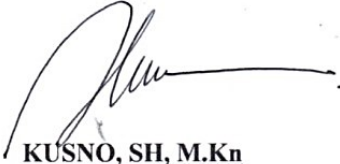
NPM : 2002100028

PRODI : ILMU HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal :

PEMBIMBING I



KUSNO, SH, M.Kn
NIDN.0104128501

PEMBIMBING II



AHMAD ANSYARI SIREGAR, SH., MH
NIDN. 0108058803

Disahkan Oleh
DEKAN FAKULTAS HUKUM



RISDALINA, S.H, M.H
NIDN. 0106066401

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : **ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PENYALAHGUNAAN WEWENANG PAJAK BUMI
BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN
LABUHANBATU SELATAN PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 3815
K/ PID. SUS/ 2021/ PT-MDN)**

NAMA : HAMRISYAH GAYO
NPM : 2002100028
PRODI : ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal 21 Juli 2024

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : RISDALINA, S.H, M.H
NIDN : 0106066401

Penguji II (Anggota)

Nama : KUSNO, SH., M.H
NIDN : 0104128501

Penguji III (Anggota)

Nama : NIMROT SIAHAAN, S.H., M.H
NIDN : 0123126901

Tanda Tangan

Rantauprapat, 21 Juli 2024

**Dekan
Fakultas Hukum**

RISDALINA, S.H, M.H
NIDN: 0106066401

**Ka. Program Studi
Ilmu Hukum**

INDRA KUMALASARI M, SH., MH
NIDN: 0125058702

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

NAMA : HAMRISYAH GAYO
NPM : 2002100028
PROGRAM STUDI : S-1 ILMU HUKUM
JUDUL ARTIKEL : **ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PENYALAHGUNAAN WEWENANG PAJAK BUMI
BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN
LABUHANBATU SELATAN PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 3815 K/
PID. SUS/ 2021/ PT-MDN).**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dikemudian ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat. Penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi – sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Rantauprapat, 03 September 2024
Yang membuat pernyataan



HAMRISYAH GAYO
NPM. 2002100028

ABSTRAK

Oleh: Hamrisyah Gayo

(2002100108)

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang sehingga orang tersebut memiliki kesempatan yang besar dalam menyalahgunakan wewenang yang ia miliki untuk meraup keuntungan pribadi dan menimbulkan kerugian bagi orang banyak. Seperti yang terjadi pada kasus tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan wewenang pajak bumi bangunan di Dinas Pendapatan Labuhanbatu Selatan pada putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ PT-MDN.

Hasil penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala bidang pendapatan di Kantor dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.966.683.208 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan rupiah). Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya represif ini juga merupakan penerapan dari kontrol sosial menurut sudut pandang kriminologi yaitu kontrol sosial formal yang mencakup lembaga-lembaga resmi seperti pemerintah, hukum, dan kepolisian. Hal ini pula yang menjadi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di Daerah Labuhanbatu Selatan Pada Surat Putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN Berdasarkan Perspektif Kriminologi. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebaiknya diperbaiki asehingga pelaksanaan kewenangan aparatur sipil negara terhindar dari kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada kerugian negara. Sebaiknya upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui perspektif kriminologi lebih diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana baik masyarakat maupun pemerintah bersama-sama turut serta dalam melakukan upaya preventif maupun represif dalam memberantas tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci: Pajak Bumi Bangunan, Tindak Pidana Korupsi, Kriminologi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **”Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Wewenang Pajak Bumi Bangunan Di Dinas Pendapatan Labuhanbatu Selatan Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN)”**.

Penulisan skripsi bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana korupsi dalam Surat Putusan Hakim Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN berdasarkan sudut pandang kriminologi. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Studi Ilmu Hukum Universitas Labuhanbatu.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Ade Parlaungan Nasution, S.E., M.Si, P.h.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu
2. Ibu Risdalina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
3. Bapak Indra Kumala Sari M, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Labuhanbatu
4. Bapak Kusno, S.H., M.H selaku pembimbing pertama.
5. Bapak Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah memberi memberi ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Bang Phatur Rozak, S.E., Kak Jungsi Waini Lubis, S.E., Kak Nurul Huda Marpaung, A.md dan seluruh Staff Karyawan Akademik, Perpustakaan, Kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
8. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu angkatan 2020 dan semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam penulisan proposal skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih belum sempurna, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari segala pihak.

Rantauprapat, 21 Juli 2024

Penulis,



Hamrisyah Gayo
NPM:2002100028

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	7
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	7
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana	13
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	14
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	14
2.3 Tinjauan Umum Kriminologi	20
2.3.1 Pengertian Kriminologi.....	20
2.4 Tinjauan Umum Pajak Bumi dan Bangunan	28
2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	37
3.2 Jenis Penelitian	37
3.3 Pendekatan Penelitian.....	38
3.4 Cara Kerja.....	38
3.5 Sumber Data	38
3.6 Analisis Data.....	39

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Dasar Hakim Dalam Jatuhkan Putusan Perkara Penyalahgunaan Wewenang Di Dinas Pendapatan Daerah Labusel Berdasarkan Surat Putusan Nomor 3815 K/Pid.Sus/PT MDN.....	40
4.1.1 Posisi Kasus.....	40
4.1.2 Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	44
4.1.3 Pertimbangan Hakim.....	45
4.1.4 Amar Putusan.....	47
4.1.5 Analisis Penulis.....	48
4.2 Implementasi Kriminologi Teradap Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Wewenang Di Daerah Labusel Pada Surat Putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN.....	51
4.2.1 Teori Kriminologi pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Wewenang Di Daerah Labusel Pada Surat Putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN.....	51
4.2.2 Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Wewenang Di Daerah Labusel Pada Surat Putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN Berdasarkan Perspektif Kriminologi.....	56

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA.....	61
----------------------------	-----------